

AKSELERASI PEMBANGUNAN *E-GOVERNMENT* DI DAERAH: ANALISIS PRAKTIK BAIK PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

Asep Cahyana

Email: gorbachevchev@gmail.com
Mata Garuda Institute

Abstract

ICT is a challenge and opportunity for local governments in effort to realize excellent service for the people. This paper aims to analyze e-government efforts and achievements of the Sumedang District Government, as well as analyze the specific factors that have driven a leap in e-government development in the region. The author uses data obtained through online observation of the official website www.sumedang.go.id, digital application trials, as well as regulations, policy documents, journals, reports, online sources and other relevant documents. The author concludes that Sumedang Regency e-government development has passed the interactive phase towards the transactional phase. The author concludes that Sumedang Regency e-government development has passed the interactive phase towards the transactional phase. The acceleration of e-government by the Government of Sumedang Regency is determined by several factors, namely the political commitment of regional leaders that underlies policies, e-government strategies, programs and activities, development of human resources for apparatus, and multi-stakeholder collaboration.

Keywords: *e-government acceleration, SPBE, public services, local government.*

Abstrak

TIK menjadi tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat di daerah. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji upaya dan capaian *e-government* Pemerintah Kabupaten Sumedang, serta menganalisis faktor-faktor khusus yang mendorong terjadinya lompatan dalam pembangunan *e-government* pada daerah tersebut. Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penulis menggunakan data yang diperoleh melalui observasi *online* terhadap *website* resmi www.sumedang.go.id, uji coba aplikasi digital, serta peraturan, dokumen kebijakan, jurnal, laporan, sumber *online*, dan dokumen relevan lainnya. Penulis menyimpulkan bahwa pembangunan *e-government* Kabupaten Sumedang telah melewati fase interaktif menuju fase transaksional. Akselerasi *e-government* oleh

Pemerintah Kabupaten Sumedang ditentukan beberapa faktor, yaitu komitmen politik pimpinan daerah yang mendasari kebijakan, strategi *e-government*, program dan kegiatan, pengembangan SDM aparatur, serta kolaborasi *multistakeholders*.

Kata Kunci: Akselerasi *E-Government*, SPBE, Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah.

Submitted: 30-08-2023 | Accepted: 30-08-2023 | Published: 30-08-2023

1. Pendahuluan

Pemerintah daerah memiliki otonomi yang luas dalam menjalankan urusan di daerah, termasuk dalam meningkatkan pelayanan umum sebagai dampak dari desentralisasi (Heo, 2018). Pemerintah daerah diakui sebagai pihak yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, termasuk pelayanan administratif, barang publik, dan jasa publik (Silalahi & Syafri, 2015). Dalam konteks ini, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang dan tantangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik (World Bank, 2002; Astawa & Dewi, 2018).

Pemerintah Kabupaten Sumedang mengambil langkah untuk memanfaatkan TIK dalam meningkatkan pelayanan publik sebagai respons terhadap evaluasi bahwa pelayanan publik belum optimal, kurang informatif, dan terlalu birokratis (Pemekab Sumedang, 2019b). Meskipun menghadapi tantangan, upaya Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam membangun *e-government* telah berhasil. Dalam lima tahun, indeks SPBE Kabupaten Sumedang meningkat menjadi 3,84, tertinggi di tingkat Kabupaten/Kota se-Indonesia (Menteri PAN-RB, 2023). Pemerintah Kabupaten Sumedang juga berhasil mengurangi angka stunting sebesar 24% dalam periode 2018-2022 (Sekretariat Kabinet, 2023).

Kesuksesan ini mendapatkan perhatian luas, termasuk apresiasi dari Presiden Jokowi dan Wakil Ketua MPR-RI Arsul Sani. Pemerintah Kabupaten Sumedang

menjadi contoh dan rujukan bagi daerah lain dalam mengadopsi strategi serupa (DetikCom, 2023; Pemkab Sumedang, 2023).

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik terbaik pengembangan e-government oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dan faktor-faktor yang mendorong akselerasi pembangunan e-government di daerah tersebut. Tulisan ini akan secara deskriptif menggambarkan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam membangun e-government, serta menganalisis faktor khusus yang berkontribusi pada percepatan pembangunan e-government.

2. Kajian Pustaka

a. Konsep Pembangunan *e-Government*

Terdapat berbagai definisi *e-government* yang diberikan oleh banyak entitas. OECD memberikan definisi yang sederhana, bahwa *e-government* merujuk pada pendayagunaan TIK, terkhusus internet, sebagai instrumen dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik (Misuraca, 2007). Bank Dunia mendefinisikan *e-government* sebagai suatu label guna mendeskripsikan berbagai aplikasi dan tujuan, yaitu penggunaan TIK yang paling inovatif seperti Internet secara pragmatis dalam rangka memberikan pelayanan, informasi, dan pengetahuan lebih efisien dan hemat biaya, sekaligus untuk menunjukkan komitmen kemitraan dari para *decision maker* kepada masyarakat (World Bank, 2002). Sedangkan menurut Misuraca (2007), *e-government* merupakan tren gabungan pemerintahan di semua tingkatan, terutama melalui cabang operasionalnya, administrasi, dan kantor pembantunya melalui akses warga negara terhadap urusan publik.

E-government dilakukan untuk mewujudkan beberapa tujuan. Pemerintah di berbagai belahan dunia mengadopsi *e-government* untuk tiga tujuan berbeda, bisa untuk mewujudkan efisiensi internal, meningkatkan pelayanan kepada warga, hingga mempromosikan daya saing ekonomi (World Bank, 2002). Melalui *e-government*, interaksi antara pemerintah dan warga negara (*Government*

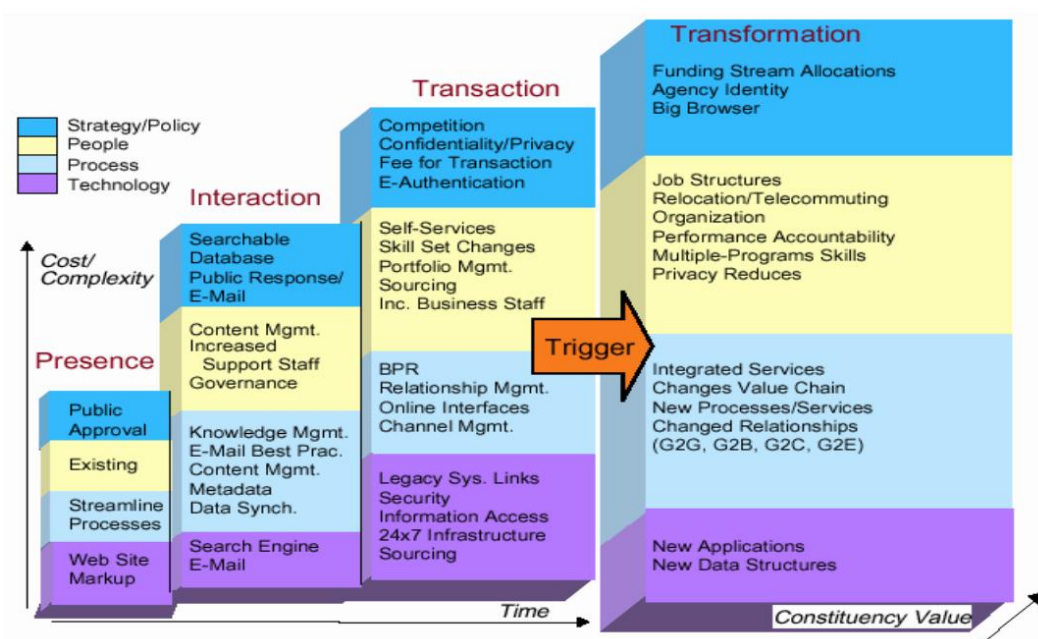
to Citizen/Citizen to Government), pemerintah dan bisnis (*Government to Business/Business to Government*), pemerintah dan pegawai pemerintahan (*Government to Employee/Employee to Government*), serta hubungan di antara institusi pemerintah (*Government to Government*) dilakukan dengan jauh lebih murah, ramah, nyaman, dan transparan. Adapun Misuraca (2007) menyatakan *e-government* bertujuan untuk mendorong: 1) efisiensi pemerintahan yang lebih baik; 2) efektivitas hubungan antarpemerintahan dan hubungan pemerintah-perusahaan; dan 3) transparansi dan pemberdayaan terhadap pengguna dan akses warga negara dalam pembuatan keputusan politik.

Prof. Claudio Ciborra sebagaimana dikutip Misuraca (2007), menyatakan *e-government* umumnya merujuk pada tiga level. Pertama, kegiatan internal administrasi serta hubungan pemerintah dan warganya. Kedua, menggambar ulang batas negara dan swasta untuk negara yang elektronik, minimal, lebih transparan, tangkas dan akuntabel. Ketiga, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sebagai karakteristik utama dari tata pemerintahan yang baik. Untuk mencapai level-level tersebut diperlukan tahapan pembangunan *e-government* yang dapat merujuk pada berbagai model pembangunan *e-government*.

Terdapat banyak sekali model pembangunan *e-government* yang ditawarkan oleh berbagai organisasi dan ahli di dunia. Almuftah et al. (2016) telah melakukan perbandingan terhadap tujuh belas model terpilih (model Hiller & Belanger, model IBM, model CISCO, model Lane & Lee, model UN E-Government Maturity, model Moon, model Accenture, model PWC, model Ernst & Young, model World Bank, model the UK Nation Audit, model the Modified UN, model Chen, model Alhomod, Kim & Grant, model Lee & Kwak, dan model Wescott) untuk melihat kesamaan umum dari model-model tersebut. Kesimpulan yang diperoleh bahwa tahapan *presence*, *communication* dan *integration* merupakan tahapan utama yang terlibat dalam semua model, dan semua model menyajikan tingkat interaksi dan kompleksitas (Almuftah et al., 2016).

Salah satu model pembangunan *e-government* adalah model Bank Dunia meliputi *presence*, *interaction*, *transaction*, dan *transformation* (World Bank, 2002). Masing-masing fase menunjukkan tingkatan perkembangan dari empat elemen dalam pembangunan *e-government*, meliputi strategi/kebijakan (*strategy/policy*), masyarakat/orang (*people*), proses (*process*), dan teknologi (*technology*) sebagaimana Gambar 1. Model lainnya yang banyak digunakan dan mudah dipahami adalah Model United Nations, yang terdiri atas fase *emerging*, *enhanced*, *intercative*, *transactional*, dan *seamless* (UNDESA, 2001).

Gambar 1. Model Pembangunan E-Government Menurut Bank Dunia



Sumber: World Bank, 2002.

E-government melalui berbagai fase, dimulai dari *emerging* di mana pemerintah hadir secara online, hingga *seamless* di mana terjadi integrasi penuh lintas administratif (UNDESA, 2001). Keberhasilan e-government perlu memperhatikan tiga prinsip: menggunakan teknologi sebagai penggerak, mempertimbangkan realitas eksisting, dan membuat layanan sesederhana mungkin (World Bank, 2002).

Pengembangan e-government dapat mengalami kegagalan yang merugikan, seperti biaya finansial, biaya kesempatan, dan biaya politik (Heeks, 2003).

Keberhasilan atau kegagalan ditentukan oleh kesenjangan desain-realitas, dengan tujuh dimensi yang perlu dipenuhi: informasi, teknologi, proses, tujuan dan nilai, kepegawaian dan keterampilan, sistem dan struktur manajemen, serta sumber daya lain (Heeks, 2003).

Pembangunan e-government tak hanya di tingkat nasional, tetapi juga lokal (Misuraca, 2007). E-local governance menggunakan TIK untuk mengubah urusan pemerintahan, melibatkan inklusi warga, pemberian layanan publik, dan partisipasi demokratis di tingkat lokal. E-government di tingkat daerah melibatkan kolaborasi semua stakeholders, termasuk instansi vertikal, BUMN, BUMD, dan swasta (Misuraca, 2007).

Pemerintah daerah di berbagai negara mengadopsi strategi unik. Misalnya, pemerintah daerah Jepang mengadopsi tiga kebijakan kunci: Joint Outsourcing, Enterprise Architecture, dan Standardization of Data (Obi, 2007).

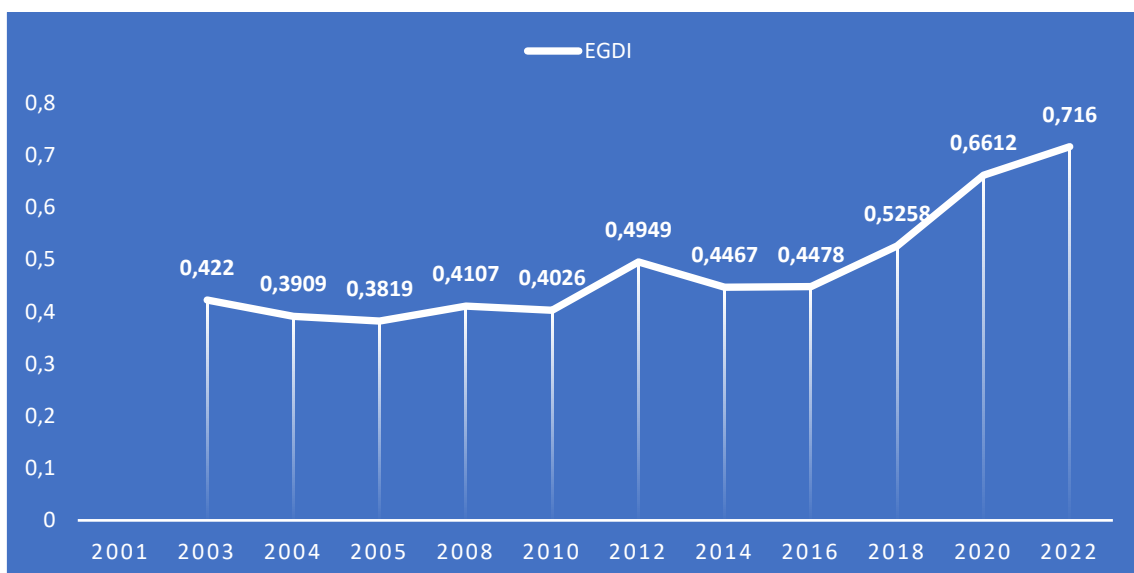
b. Pembangunan *e-Government* di Indonesia

Pemerintah menyadari pentingnya *e-government* pada awal tahun 2000-an. Hal itu diwujudkan melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Inpres yang ditandatangani Presiden Megawati itu dikeluarkan setelah mempertimbangkan sejumlah manfaat penerapan TIK bagi penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam konsideran Inpres. Intinya bahwa kemajuan TIK dan pemanfaatannya memberikan peluang dalam akses, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam skala luas, cepat, serta akurat. *E-government* juga dipercaya mampu mendorong peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Selain itu, *e-government* sangat diperlukan untuk mendukung *good governance* dan peningkatan layanan publik.

Perkembangan *e-government* Indonesia pasca Inpres tersebut diterbitkan mulai meningkat namun agak lambat. Dua tahun sebelum Inpres Nomor 3 Tahun 2003, hasil *benchmarking* oleh *United Nations Departement of Social and*

Economic Affairs menempatkan Indonesia dalam jajaran negara dengan kapasitas *e-government* minimal (UNDESA, 2001). Apabila melihat skor *E-Government Development Index* Indonesia sebagaimana penulis sajikan pada Gambar 2, pada tahun-tahun pasca diterbitkan Inpres justru sempat turun dari 0,422 (tahun 2003) menjadi 0,3909 (tahun 2004). Skor EGDI Indonesia baru mulai menanjak sejak tahun 2008 hingga tahun 2012, meskipun sempat mengalami penurunan lagi pada tahun 2014. Tetapi sejak tahun 2016, EGDI Indonesia terus mengalami tren kenaikan.

Gambar 2. Skor Indeks Pembangunan *e-Government* (EGDI) Indonesia 2001-2022

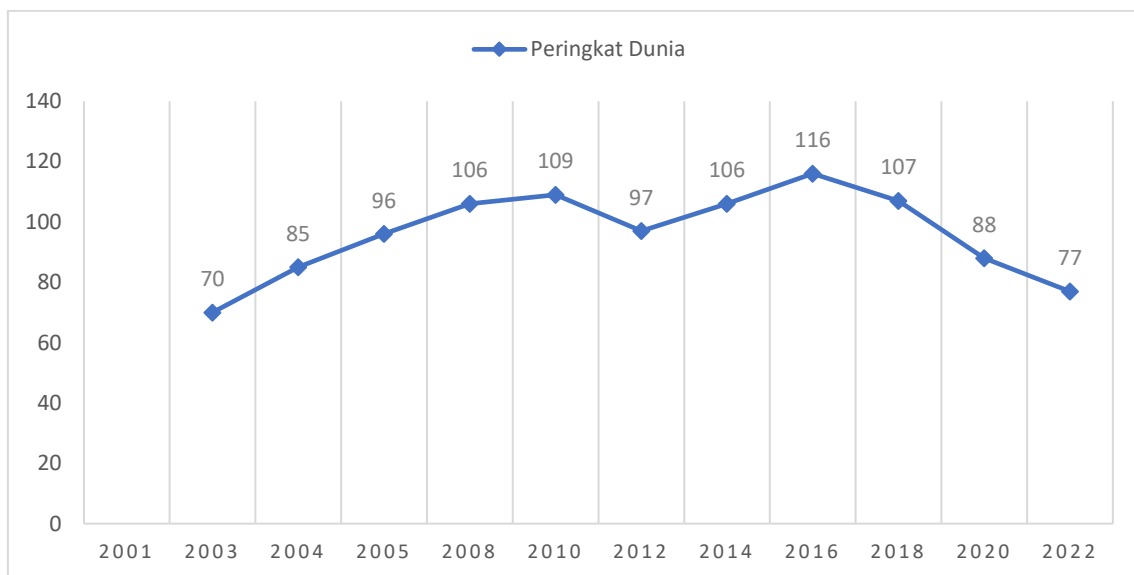


Sumber: Diolah dari UNDESA, 2001-2022

Lima belas tahun setelah terbitnya Inpres Nomor 3 Tahun 2003, survey pembangunan *e-Government* menempatkan Indonesia dalam jajaran negara Indeks Pembangunan *e-Government* (EGDI) tinggi dengan indeks 0,5258 dan menempati peringkat 107 dunia (UNDESA, 2018). Sejak Inpres tersebut diterbitkan, peringkat EGDI Indonesia memang mengalami pasang surut, namun secara umum ada di bawah negara ASEAN lainnya. Indonesia tertinggal dari Singapura (EGDI 0,8812 peringkat 7), Malaysia (EGDI 0,7174 peringkat 48), Thailand (EGDI 0,6543 peringkat 73), dan Philipina (EGDI 0,6512 peringkat 75)

pada tahun 2018 (UNDESA, 2018). Sedangkan pada tahun 2022, ketika Indonesia menduduki peringkat 77 dengan skor 0,716 negara tetangga Singapura menempati urutan 12 (skor EGDI 0,915), Thailand di urutan 55 (skor EGDI 0,7763), Malaysia menempati urutan 53 (skor EGDI 0,774), dan Philipina menempati urutan 89 (skor EGDI 0,6523). Perkembangan terbaru itu menandakan bahwa Indonesia sudah mulai bisa bersaing dengan negara di kawasan ASEAN dalam lima tahun terakhir.

Gambar 3. Peringkat EGDI Indonesia di Dunia



Sumber: Diolah dari UNDESA, 2001-2022

Kurang suksesnya pembangunan *e-government* pada masa kebijakan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 bisa terjadi karena kegagalan dalam memahami 'kenyataan' (*current reality*) dan 'apa yang akan dicapai dengan proyek *e-government* itu' (Heeks, 2003). Strategi yang dibuat melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2003 masih terlalu umum (Kumorotomo, 2010). Pembangunan *e-government* kala itu dihadapkan pada beberapa situasi masalah seperti bersifat sektoral, tidak integratif, kurang aman/beresiko, validitas data diragukan, serta terjadi pemborosan anggaran (KemenPANRB, 2018). Total belanja TIK pemerintah pusat dan daerah selama 2014-2016 mencapai 12,7 triliun rupiah

tetapi utilitas TIK hanya mencapai 30% (Machdi, 2018). Hal ini tentu saja belum sesuai dengan harapan publik yang menginginkan pelayanan yang efektif, transparan, dan cepat (KemenPANRB, 2018).

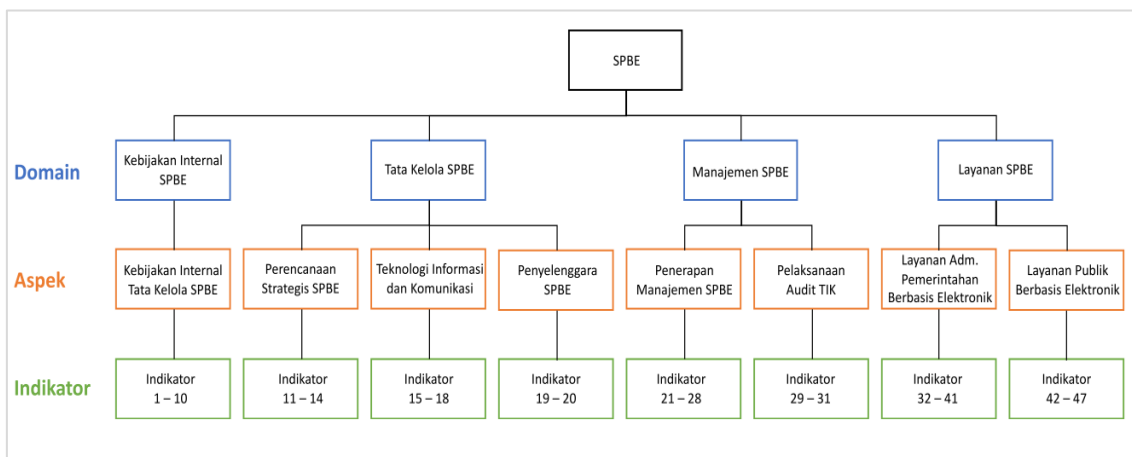
Menyadari kelemahan tersebut, Pemerintah Indonesia memperkuat pengaturan mengenai *e-government* dengan mengeluarkan Peraturan Presiden. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) itu memuat pengaturan SPBE dengan jauh lebih komprehensif dibandingkan Inpres Nomor 3 Tahun 2003. Dalam Perpres, SPBE didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan TIK dalam rangka memberikan pelayanan bagi penggunanya. Tujuan SPBE antara lain pemerintahan dan pelayanan yang bersih, akuntabel, terpercaya, efisien, dan efektif. SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip keterpaduan, akuntabilitas, interoperabilitas, efektivitas, efisiensi, kesinambungan, dan keamanan. *E-government* model Indonesia tersebut dipercaya mampu meningkatkan transparansi, keterlibatan masyarakat, dan produk domestik bruto (Atmojo & Nurwulan, 2020).

Pengaturan yang komprehensif dicirikan dengan ruang lingkup Perpres Nomor 95 Tahun 2018 yang lengkap meliputi tata kelola, manajemen, audit TIK, penyelenggara, percepatan, serta monitoring dan evaluasi (Cahyana, 2020). Layanan dalam SPBE mencakup layanan *government to government* (G2G) seperti *e-Office*, *e-Planning*, *e-Budgeting*, dan *e-Monev*; layanan *government to employee* (G2E) seperti e-Kepegawaian dan e-Pensiun; layanan *government to citizen* (G2C) seperti e-Pengaduan, e-Pendidikan, dan e-Kesehatan; serta layanan *government to business* G2B seperti *e-Procurement* dan e-Perizinan).

Pembangunan SPBE nantinya dilakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka mengukur tingkat kemajuan serta untuk mendorong peningkatannya. Tingkat kematangan diukur dari tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan (Menteri PANRB, 2020). Kapabilitas proses terdiri dari lima tingkatan yaitu rintisan, terkelola, terdefinisi, terpadu dan terukur, serta optimum. Kapabilitas layanan terdiri dari lima tingkatan yaitu informasi,

interaksi, transaksi, kolaborasi, dan optimum. Penilaian tingkat kematangan penerapan SPBE itu meliputi domain, aspek, dan indikator. Terdapat 4 (empat) domain yaitu domain kebijakan, domain tata kelola, dan domain layanan yang diturunkan ke dalam 8 (delapan) aspek serta 47 (sempat puluh tujuh) indikator. Hasil penilaian tersebut berupa Indeks SPBE yang terdiri dari lima tingkatan yaitu nilai <1,8 predikat Kurang, nilai 1,8 - <2,6 predikat Cukup, nilai 2,6 - <3,5 predikat Baik, nilai 3,2 - <4,2 predikat Sangat Baik, nilai 4,2 - 5,0 predikat Memuaskan (Menteri PANRB, 2020).

Gambar 4. Struktur Penilaian Tingkat Kematangan SPBE



Sumber: Menteri PANRB, 2020.

Pengaturan SPBE oleh pemerintah daerah yang dewasa ini memiliki peran sangat penting dalam pelayanan publik terhadap masyarakat, sehingga Perpres Nomor 95 Tahun 2018 juga mengatur SPBE dalam konteks di daerah. Menurut Perpres tersebut, arsitektur SPBE di daerah berlaku selama lima tahun yang disusun dengan mempedomani RPJMD dan arsitektur SPBE nasional. Penyelarasan arsitektur SPBE daerah dan nasional dilakukan di bawah koordinasi Menteri PANRB. Begitu pula dengan peta jalan, infrastruktur, jaringan intra pemerintah, dan lain-lain, Perpres Nomor 95 Tahun 2018 bukan hanya mengatur untuk tingkat nasional melainkan juga bagi daerah dengan memberikan ruang bagi pengaturan lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.

Kebijakan berupa Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tersebut cukup efektif mendongkrak skor EGDI Indonesia. Indeks pembangunan *e-governement* Indonesia yang semula hanya 0,5258 pada tahun 2018 melompat cukup jauh menjadi 0,716 pada tahun 2020. Peringkat EGDI Indonesia pun naik cukup drastis, dari peringkat 107 pada tahun 2018 menjadi peringkat 77 pada tahun 2022. Menurut beberapa penelitian, implementasi dari SPBE tersebut dipengaruhi banyak faktor. Karunia et al. (2023) menemukan bahwa faktor teknologi informasi dan sumber daya manusia mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap implementasi *e-governement* di Indonesia. Adapun Atmojo & Nurwulan (2020) menyatakan tiga faktor penting dalam penerapan sistem *e-governement* di negara berkembang termasuk Indonesia, yaitu tahapan kematangan yang berbeda, kesadaran warga, dan penilaian yang tepat. Menurut temuan Farida et al. (2020), meskipun pembangunan *e-governement* Indonesia sudah meningkat namun belum terdistribusi merata di semua wilayah dan masih terbatas berupa informasi statis, serta terdapat kendala yang fundamental dalam implementasinya di level daerah.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Merujuk pengumpulan data yang dilakukan Astawa & Dewi (2018), penulis memperoleh data melalui observasi *online* terhadap *website* resmi www.sumedang.go.id, uji coba aplikasi digital, serta peraturan, dokumen kebijakan, jurnal, laporan, sumber *online*, dan dokumen releva lainnya yang dipandang relevan. Terhadap data yang diperoleh, penulis melakukan analisis dengan mengaplikasi model interaktif (Miles et al., 2014) dengan tahapan kondensasi (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta verifikasi dan penarikan kesimpulan (*verification and conclusion*) secara interaktif dan siklikal.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Komitmen Politik Pimpinan Kabupaten Sumedang

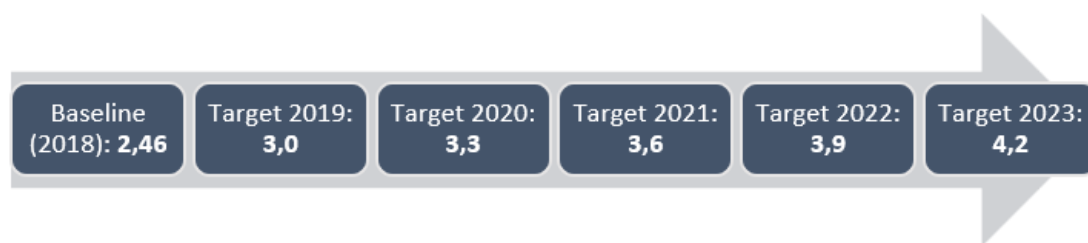
Pemerintah Kabupaten Sumedang sejak lama telah menyadari adanya kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publiknya. Salah satunya dalam RPJMD 2014-2018, yang mana salah satu isu strategis yang diangkat adalah reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja pelayanan publik. Sayangnya, dalam periode tersebut tidak secara eksplisit mengangkat peluang TIK sebagai *enabler* ditandai dengan tidak munculnya narasi mengenai TIK dalam visi, misi, tujuan, serta sasaran pembangunan pada RPJMD tersebut.

Dalam perjalanannya, permasalahan kinerja birokrasi dan pelayanan publik belum dapat diatasi sehingga muncul kembali dalam isu strategis RPJMD 2019-2023. Dalam dokumen rencana pembangunan itu, Pemerintah Kabupaten Sumedang mengusung isu pembenahan struktural, prosedur, budaya dan etika birokrasi, serta berbagai elemen seperti reformasi keuangan, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik (Cahyana, 2020; Pemkab Sumedang, 2019b). Kali ini isu tersebut dibarengi dengan narasi dalam RPJMD mengenai potensi pendayagunaan TIK sebagai penggerak kinerja pemerintahan dan peningkatan layanan publik.

Visi dan misi Bupati-Wakil Bupati Sumedang 2018-2023 menjadi cikal bakal masuknya isu pengembangan *e-government* dalam kebijakan pembangunan di Kabupaten Sumedang. Visi yang diambil adalah “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sumedang yang sejahtera, agamis, maju, profesional, dan kreatif pada tahun 2023”. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*) dikaitkan dengan profesionalisme yaitu kemampuan, keahlian, serta keterampilan aparat pemerintah dalam menyediakan layanan publik kepada masyarakat secara transparan, efektif, efisien, dan responsif. Salah satu misi untuk mewujudkan visi tersebut adalah “Menata birokrasi pemerintah dan bertanggungjawab dalam pelayanan masyarakat.” Hal ini terinspirasi dari keinginan masyarakat agar pemerintahan lebih interaktif, responsif, dialogis, transparan, dan profesional (Pemkab Sumedang, 2019b). Bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang, TIK menjadi peluang yang dapat dioptimalkan untuk mewujudkan keinginan masyarakat tersebut.

Dalam melaksanakan misi tersebut, telah ditetapkan beberapa tujuan. Pertama, tujuan berupa birokrasi yang bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kedua, tujuan berupa terlaksananya kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Untuk mencapainya maka ditetapkan sasaran berupa sistem pelayanan terpadu yang didukung pemanfaatan TIK. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sumedang menargetkan peningkatan indeks SPBE menjadi 4,2 (predikat Memuaskan) pada 2023. Apabila melihat *baseline* sebesar 2,46 pada awal pencanangan, bisa dikatakan bahwa target tersebut sangat optimis dan berani.

Gambar 5. Target Indeks SPBE Kabupaten Sumedang



Sumber: RPJMD Kab. Sumedang 2019-2023

Masuknya isu pemanfaatan TIK di dalam agenda kebijakan dan rencana strategis daerah Kabupaten Sumedang tidak terlepas dari kemauan politik pimpinan daerah itu. Penjabaran atas visi dan misi kepala daerah yang secara eksplisit mengaitkan pendayagunaan TIK untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan tersebut menunjukkan komitmen politik yang sangat besar untuk mewujudkan *e-government*. Hal ini sesuai dengan teori mengenai *agenda setting* kebijakan (Kingdon, 2014), bahwa masalah kebijakan dan alternatif solusinya dapat masuk ke dalam agenda kebijakan apabila terdapat dukungan politik (*political stream*).

b. Strategi Kebijakan SPBE Kabupaten Sumedang

Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan pembangunan SPBE di daerahnya dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan. Sebenarnya, sejak masa berlakunya Inpres Nomor 23 Tahun 2003, telah diterbitkan Peraturan Bupati

Sumedang Nomor 114 Tahun 2015 tentang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang. Perbup Nomor 114 Tahun 2015 sempat direvisi dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 111 Tahun 2019. Perbup Sumedang Nomor 114 Tahun 2015 mengusung visi “mewujudkan Kabupaten Sumedang menuju *Smart Government*”. Beberapa misi yang ditetapkan, antara lain: pertama, memperkuat tata kelola *e-government*; kedua, pengembangan infrastruktur dan sistem informasi terpadu dalam rangka peningkatan dan pelayanan publik; ketiga, meningkatkan keterbukaan informasi publik. Perbup Sumedang Nomor 114 Tahun 2015 juga mengatur arah kebijakan umum, kelembagaan, perencanaan, infrastruktur, aplikasi, situs, data, SDM, dan pembiayaan.

Menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan yang dinamis, Perbup Sumedang Nomor 114 Tahun 2015 diganti dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 63 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Ruang lingkup peraturan ini masih sama seperti pendahulunya. Adapun beberapa arah kebijakan dasar yang tercantum dalam Perbup Sumedang Nomor 63 Tahun 2020, yaitu: Pertama, Pemkab Sumedang wajib mengacu pada perencanaan induk pengembangan SPBE; Kedua, wajib didukung dengan prosedur operasional standar (SOP); Ketiga, dapat dikerjasamakan dengan pihak lain; Keempat, pembaharuan integrasi dan proses bisnis antarpihak sesuai kebutuhan serta perkembangan teknologi dan lingkungan; Kelima, evaluasi dilakukan oleh perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi untuk dilaporkan kepada Bupati Sumedang.

Dinamika pembangunan SPBE dan perubahan kebutuhan berlangsung sangat cepat, menjadikan Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu menyesuaikan kembali beberapa kebijakan SPBE-nya. Maka diterbitkanlah Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 66 Tahun 2022. Beberapa tambahan substansi kebijakan dalam Perbup Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 dan Perbup

Sumedang Nomor 66 Tahun 2022 melengkapi Perbup sebelumnya. Tata kelola SPBE yang diatur dalam Perbup tersebut meliputi unsur-unsur SPBE pada pemerintah daerah.

Bekerja sama dengan Universitas Prasetya Mulya, Pemerintah Kabupaten Sumedang menyusun *Masterplan* Transformasi Digital Menuju Sumedang *Happy Digital Region* (Pekab Sumedang & UPM, 2020). *Masterplan* itu menjabarkan misi, strategi, rencana aksi, *quick wins*, serta peta jalan Sumedang sebagai *smart city*. *Tagline* “Sumedang *Happy Digital Region*” merupakan suatu bentuk *city branding* dalam mendukung identitasnya sebagai Kabupaten Digital. Tujuannya untuk menciptakan reputasi kota yang diperlukan dalam mendorong pelayanan publik dan menarik investor (Yuniawati et al., 2023).

Salah satu strategi dalam *masterplan* tersebut adalah pembangunan *Smart Governance*. Hal yang menarik bahwa untuk menjalankan strategi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang menekankan pada pemetaan dan peningkatan kompetensi aparatur daerah dalam pemanfaatan teknologi informasi dan sosial media. Kegiatannya meliputi pembentukan kelompok kerja (pokja), kerja sama dengan asosiasi pakar TIK, uji kompetensi TIK aparatur, pemetaan kompetensi TIK aparatur, peningkatan kompetensi TIK bagi aparatur dengan kompetensi rendah, beasiswa gelar/non gelar bagi ASN bidang TIK, hingga monitoring, evaluasi dan rotasi terhadap ASN yang tetap tidak dapat meningkatkan kompetensi TIK-nya (Pekab Sumedang & UPM, 2020). Sesuai penelitian Karunia et al. (2023) bahwa faktor SDM memiliki dampak positif yang signifikan terhadap implementasi *e-government*.

Strategi lainnya berupa *smart branding*, dengan kegiatannya antara lain berupa pembuatan *super application* dan *digital branding communication*. Melalui pemanfaatan *super application* diharapkan dapat melayani seluruh kegiatan *stakeholders* di Kabupaten Sumedang dengan cepat, murah, dan mudah (Pekab Sumedang & UPM, 2020). Komunikasi *digital branding* dilakukan dengan membangun kanal komunikasi seperti *website*, Youtube, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Indikatornya berupa peningkatan penjualan produk barang/jasa,

peningkatan kunjungan turis lokal/asing, peningkatan minat investor, serta tumbuhnya minat belajar, bekerja dan berusaha. Sebagaimana Yuniawati et al. (2023), *branding* dapat menciptakan reputasi kota dalam mendorong pelayanan publik dan menarik investor.

c. Program dan Capaian SPBE Kabupaten Sumedang

Percepatan dalam pembangunan *e-government* di Kabupaten Sumedang dimulai pada tahun 2019. Diskominfosanditik Kabupaten Sumedang melaksanakan sejumlah program dan kegiatan pembangunan *e-government* termasuk infrastruktur TIK (Cahyana, 2020). Target jangka pendeknya adalah terintegrasinya aplikasi antar Perangkat Daerah serta berkembangnya situs resmi Pemerintah Kabupaten Sumedang www.sumedang.go.id (Pembkab Sumedang, 2019a).

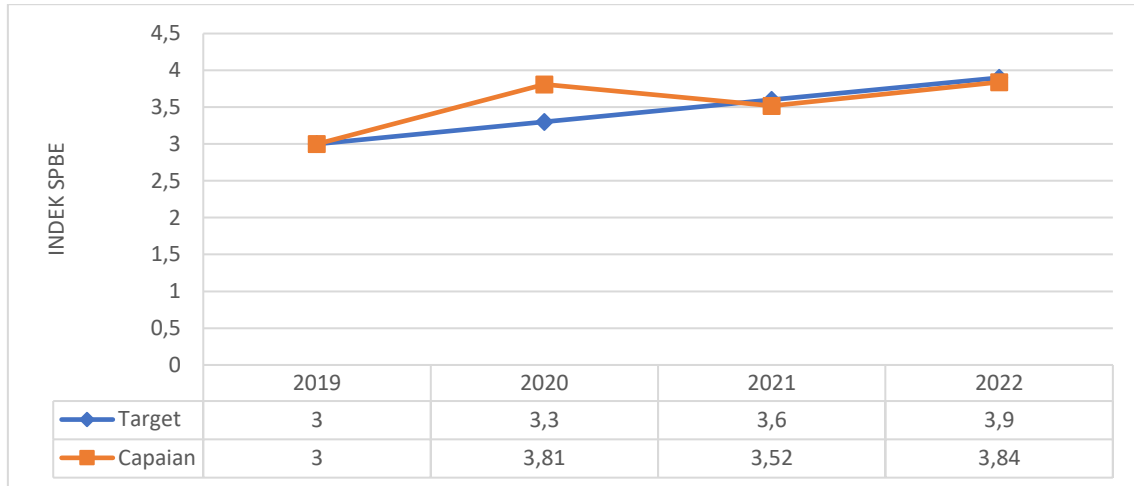
Guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap internet, Pemerintah Kabupaten Sumedang membangun infrastruktur TIK berupa wifi yang dapat diakses secara gratis dan luas oleh masyarakat (Cahyana, 2020). Harapannya, dengan penyediaan wifi gratis ini dapat mendorong literasi digital dan ruang diskusi publik (Pembkab Sumedang, 2020). Pemasangan wifi diprioritaskan pada tempat berkumpul masyarakat, tempat penyelenggaraan layanan publik, area pengembangan ekonomi kreatif, serta daerah-daerah terluar (Cahyana, 2020). Kini wifi publik itu telah menyebar di 161 desa di seluruh wilayah Sumedang mendapat dukungan provider Telkomsel yang memiliki 890 BTS dan layanan 4G LTE yang canggih (Yuniawati et al., 2023). Pemerintah Kabupaten Sumedang juga bekerja sama dengan PLN Icon Plus untuk menyediakan jaringan internet di 270 desa dan 7 kelurahan, termasuk desa-desa yang sulit dijangkau (PLN Icon Plus, 2023).

RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2020 menetapkan pembentukan sistem *e-government* sebagai salah satu sasaran dalam prioritas pembangunan

(Pekab Sumedang, 2019a). Prioritas pembangunan dimaksud adalah meningkatkan profesionalisme aparatur dan peningkatan pelayanan publik. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas sasaran ini adalah Bappeda Kabupaten Sumedang. Langkah Pemerintah Kabupaten Sumedang ini sangat tepat karena secara prinsip, *e-government* seharusnya menjadi *enabler* atau penggerak dalam mewujudkan tujuan bukan sebagai tujuan itu sendiri (World Bank, 2002). Dalam hal ini tujuannya adalah meningkatnya kinerja aparatur pemerintah yang pada ujungnya berupa peningkatan kualitas pelayanan publik.

Program pembangunan *e-government* Kabupaten Sumedang tahun 2020 itu terimplementasi dengan baik, bahkan melampaui target kinerja yang ditetapkan. Pengembangan infrastruktur TIK menuju *e-digital* yang ditargetkan pada 28 Perangkat Daerah terimplementasi yaitu sebanyak 55 Perangkat Daerah, hampir dua kali lipat yaitu 196,43% (Pekab Sumedang, 2021a). Akselerasi juga terlihat dari signifikannya peningkatan Indeks SPBE Kabupaten Sumedang pada tahun itu, dari 2,46 pada 2018 menjadi 3,81 pada 2020 ((Pekab Sumedang, 2021a). Meskipun peningkatan indeks SPBE sedikit di bawah target RPJMD, namun capaian Pemerintah Kabupaten Sumedang menempati posisi tertinggi dibandingkan kabupaten/kota yang lain di Indonesia. SPBE tersebut masih ditemukan sejumlah kendala teknis seperti gangguan, *error* aplikasi, dan kurangnya pemahaman pegawai terhadap aplikasi *e-office*. Diskominfo sanditik mengusulkan adanya penambahan dan pemeliharaan server, serta bimbingan teknis dan sosialisasi penggunaan *e-office* (Pekab Sumedang, 2021a).

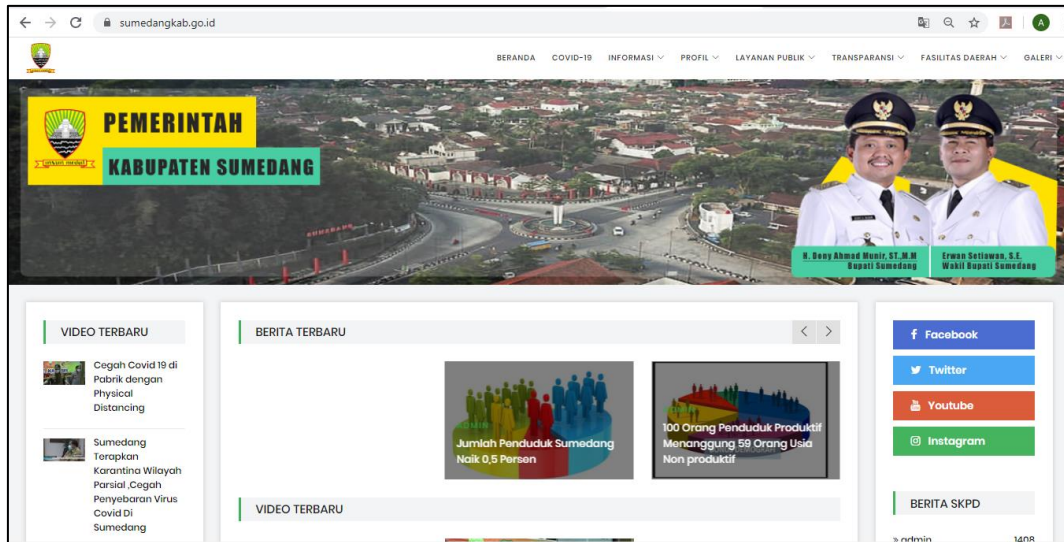
Gambar 6. Capaian Indeks SPBE Kabupaten Sumedang



Sumber: diolah dari berbagai sumber, penulis (2023)

Capaian Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam membangun *e-government* di wilayahnya dapat dilihat dari maturitas *website*, berkembangnya beberapa *super apps*, serta penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik berbasis digital. Situs web resmi Pemerintah Kabupaten Sumedang adalah <https://www.sumedangkab.go.id>. Sebelumnya pada tahun 2020, situs web tersebut hanya menampilkan informasi umum seperti artikel berita, pengumuman, agenda kegiatan, profil, persyaratan atau prosedur pelayanan publik tertentu, dokumen kebijakan dan anggaran, fasilitas daerah, serta galeri foto/video. Sebagian informasi tersedia secara *up to date* sedangkan sebagian lainnya kurang faktual dan informatif. Situs tersebut juga menampilkan tautan ke media sosial resmi Pemkab Sumedang seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, dan Whatsapp *Quick Response*.

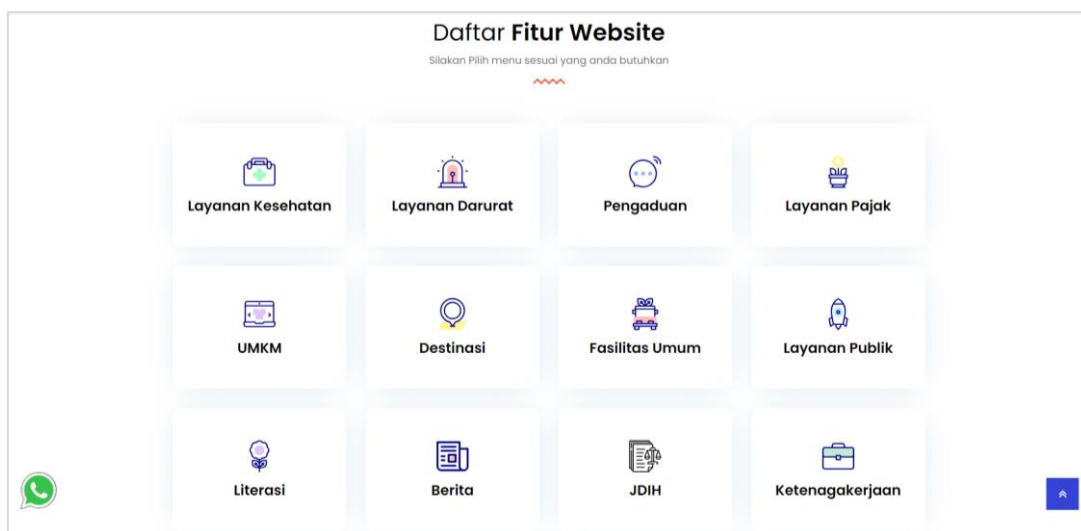
Gambar 7. Tampilan *Website* Resmi Pemkab Sumedang Tahun 2020



Sumber: Koleksi Penulis, 2020.

Seiring pengembangan SPBE, *website* resmi Pemerintah Kabupaten Sumedang bertransformasi menjadi lebih lengkap dan matang. Ketika situs dibuka, sebuah *pop up* langsung muncul yang berisikan daftar program strategis Kabupaten Sumedang. Tampilan utama *website* terdiri atas sejumlah menu yaitu beranda, profil Sumedang, transparansi publik, layanan, Explore Sumedang, informasi, dan lainnya. Situs tersebut juga menyediakan berbagai pilihan bahasa yang difasilitasi oleh Google. *Website* tersebut telah terintegrasi dengan semua website Perangkat Daerah yang dapat diakses cukup dengan mengklik nama Perangkat Daerah pada tampilan utama. Selain itu, *website* juga menawarkan sejumlah fitur, seperti layanan kesehatan, layanan darurat, pengaduan, layanan pajak, UMKM, destinasi, fasilitas umum, layanan publik, layanan publik, literasi, berita, JDIH, dan ketenagakerjaan.

Gambar 8. Tampilan *Website* Pemkab Sumedang Tahun 2023

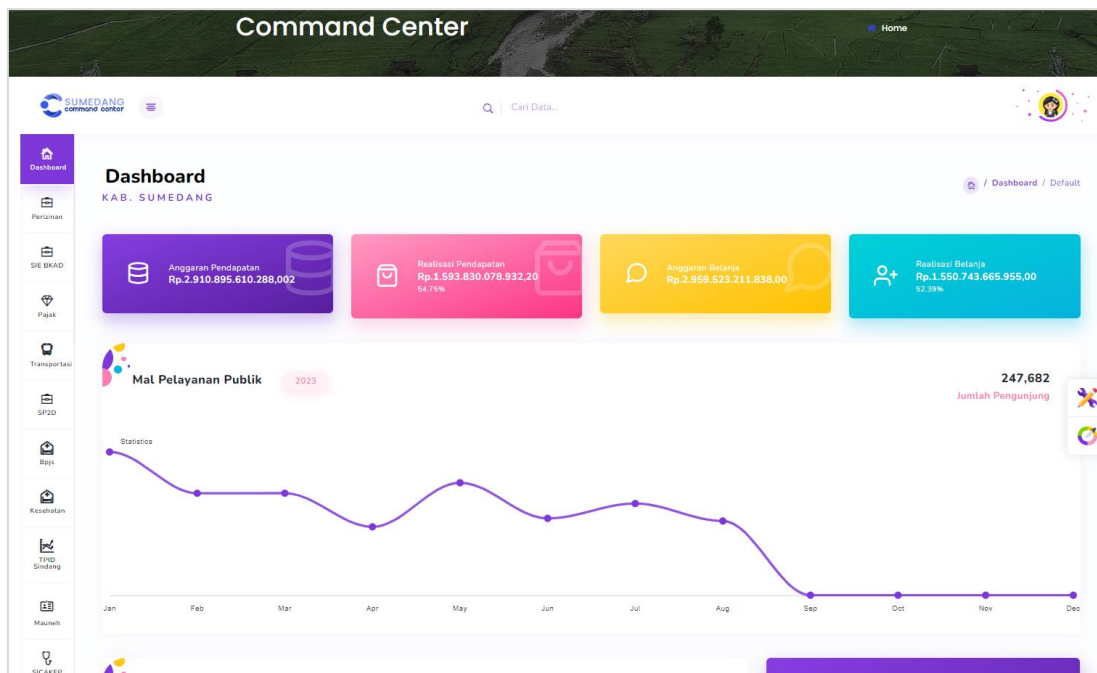


Sumber: www.sumedang.go.id, 2022.

Salah satu fitur yang menarik dari *website* Pemkab Sumedang adalah *Command Centre* yang ada pada menu Transparansi Publik. *Command Centre* merupakan tampilan data statistik *realtime* yang disajikan dengan tampilan berupa infografis yang menarik. Tampilan *dashboard* utama pada *Command Centre* langsung menampilkan data *realtime* APBD meliputi anggaran pendapatan, realisasi pendapatan, anggaran belanja dan realisasi belanja, serta menampilkan statistik jumlah pengunjung MPP. Data lainnya yang ditampilkan secara *realtime* pada *Command Centre* adalah statistik realisasi perizinan, realisasi belanja SKPD, realisasi pajak, transportasi dan parkir, Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D), data *Universal Health Coverage* (UHC)/BPJS, layanan fasilitas kesehatan (puskesmas dan rumah sakit), inflasi, bantuan sosial, serta ibu hamil dan melahirkan.

Gambar 9. Tampilan *Command Centre* pada *Website* Pemkab Sumedang

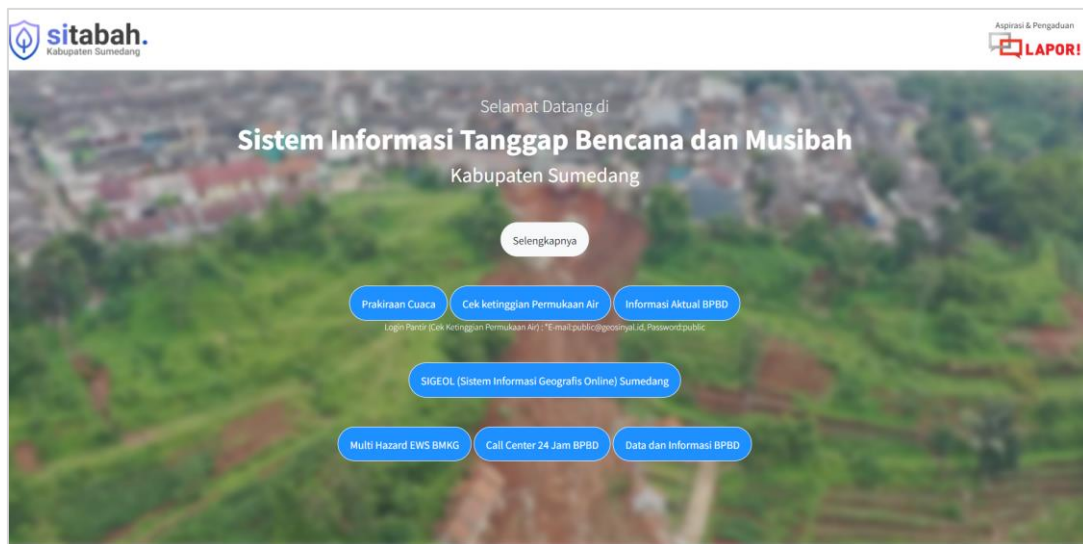


Sumber: www.sumedang.go.id, 2023.

Terkait pelayanan publik, *website* tersebut memang belum menyediakan menu yang bersifat transaksi. Menu dan fitur yang tersedia lebih banyak bersifat layanan bersifat informasi ataupun interaktif, misalnya dengan keberadaan submenu *download*, pintasan media sosial resmi Pemkab Sumedang (WhatsApp, Instagram, Youtube, Twitter, dan Facebook), serta pintasan ke beberapa *super apps* seperti *e-office* Sumedang, *e-office* Desa Sumedang, Sitabah Kabupaten Sumedang, Si Ice Mandiri, MPP Kabupaten Sumedang, dan Tahu Sumedang. Melalui *super apps* itulah layanan yang bersifat transaksi dapat dilakukan. Sistem Informasi Tanggap Bencana dan Musibah (Sitabah) misalnya menyediakan layanan Call Center 24 Jam BPBD. Sedangkan Si Ice Mandiri (Sistem Informasi Izin Cetak Mandiri) memungkinkan pengguna layanan mengunduh produk

layanan berupa dokumen perizinan ataupun non perizinan dalam bentuk digital (Pekab Sumedang, 2021b).

Gambar 10. Sistem Informasi Tanggap Bencana dan Musibah

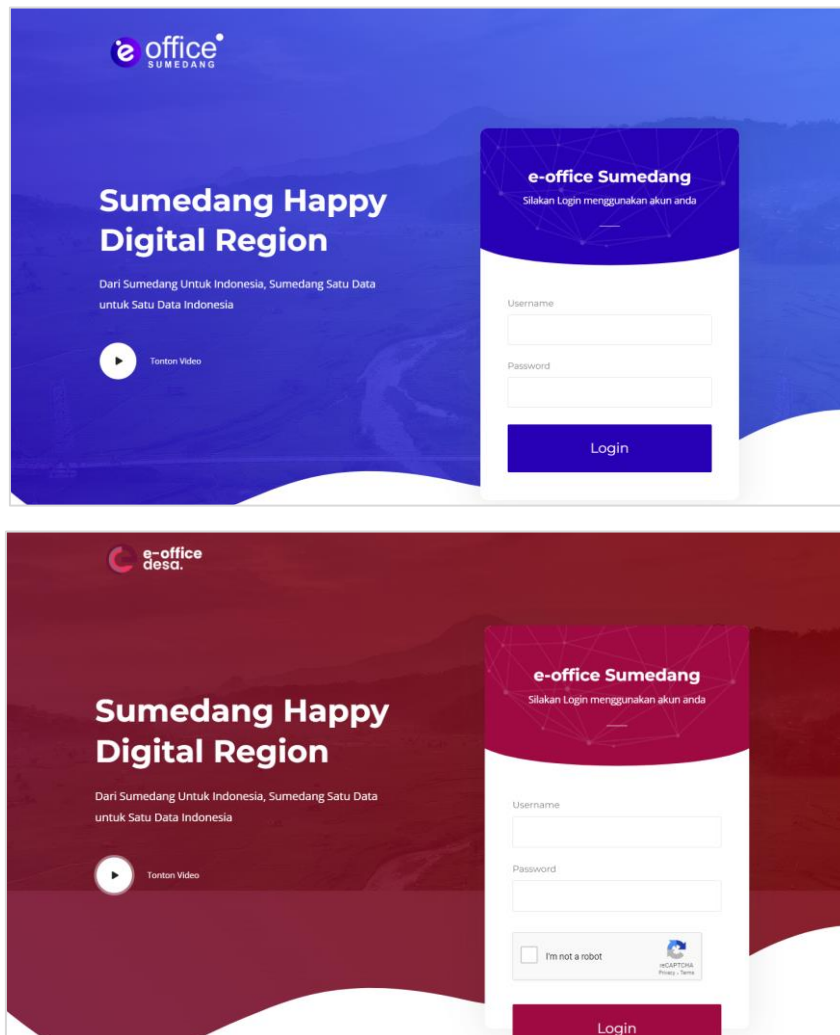


Sumber: www.sumedang.go.id, 2023.

E-office Sumedang merupakan aplikasi yang mendukung pengadministrasian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang. Aplikasi ini bertujuan memberikan dukungan terhadap penerapan *e-government* di Kabupaten Sumedang dengan mengefisienkan manajemen surat menyurat sehingga lebih cepat, mudah, hemat, dan aman. Dilengkapi dengan fitur tanda tangan digital dan *QR code* yang dikeluarkan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) dan Badan Sertifikasi Elektronik (BsrE), dokumen yang dihasilkan aplikasi *e-office* memiliki keabsasahan yang sama dengan dokumen yang ditandatangani basah dan distempel. Tingkat penggunaan *e-office* khususnya pada Sekretariat Daerah telah mencapai 100% (Pekab Sumedang, 2021a). Penggunaan *e-office* telah diperluas ke level desa dengan pengembangan *e-office* desa. Aplikasi ini merupakan implementasi dari G2G yang memfasilitasi koordinasi, komunikasi, dan integrasi data antar SKPD (Yuniawati et al., 2023). Melalui aplikasi *e-office* desa, *intergovernmental relation* secara digital yang terjadi

bukan hanya antar-SKPD melainkan juga antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan Pemerintah Desa yang ada di wilayahnya.

Gambar 11. Tampilan Aplikasi e-Office dan e-Office Desa

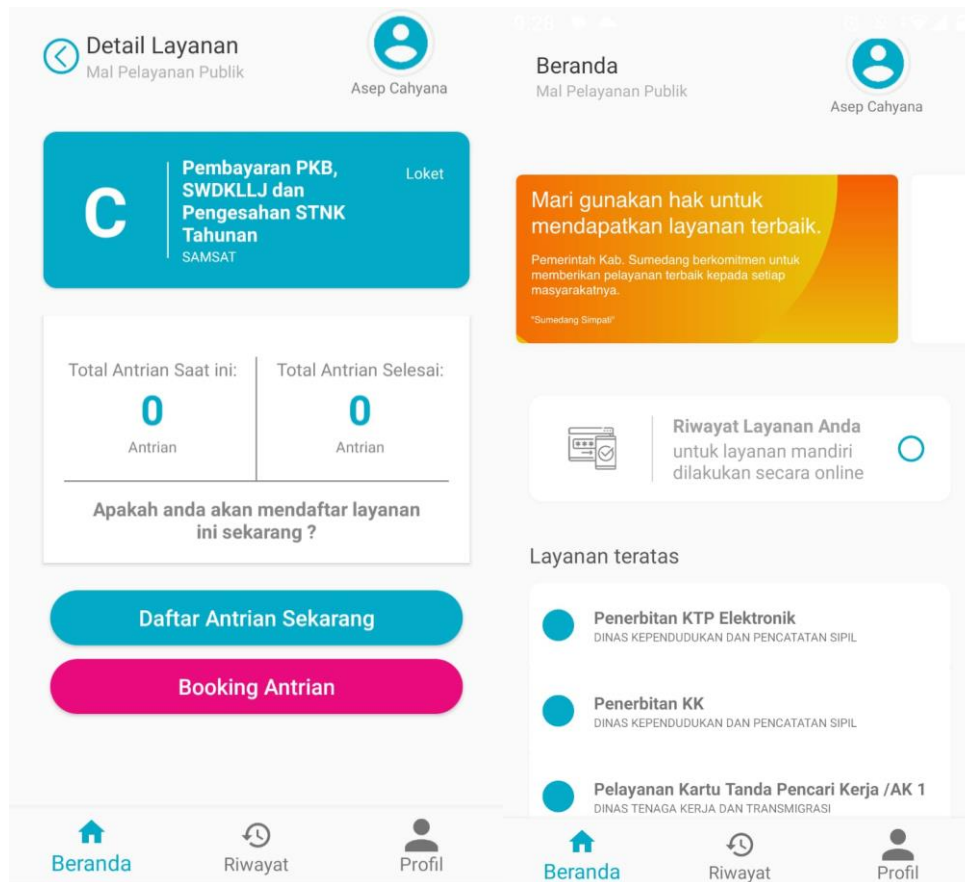


Sumber: e-office.sumedangkab.go.id; e-officedesa.sumedangkab.go.id, 2023.

Seiring pelaksanaan transformasi digital, Pemerintah Kabupaten Sumedang mulai mengembangkan *Digital Public Service Mall* (Mal Maya Pelayanan Publik). Inovasi itu dilakukan melalui aplikasi Tahu Sumedang (Pemkab Sumedang, 2021a). Mal Pelayanan Publik itu sendiri merupakan pelayanan terpadu dari penyelenggara SKPD, instansi vertikal, BUMN, BUMD, maupun pihak swasta pada satu gedung yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten

Sumedang. Selain pada aplikasi Tahu Sumedang, MPP Sumedang didukung aplikasi MPP dan *website* resmi <https://mpp.sumedangkab.go.id>.

Gambar 12. Tampilan Aplikasi MPP Sumedang



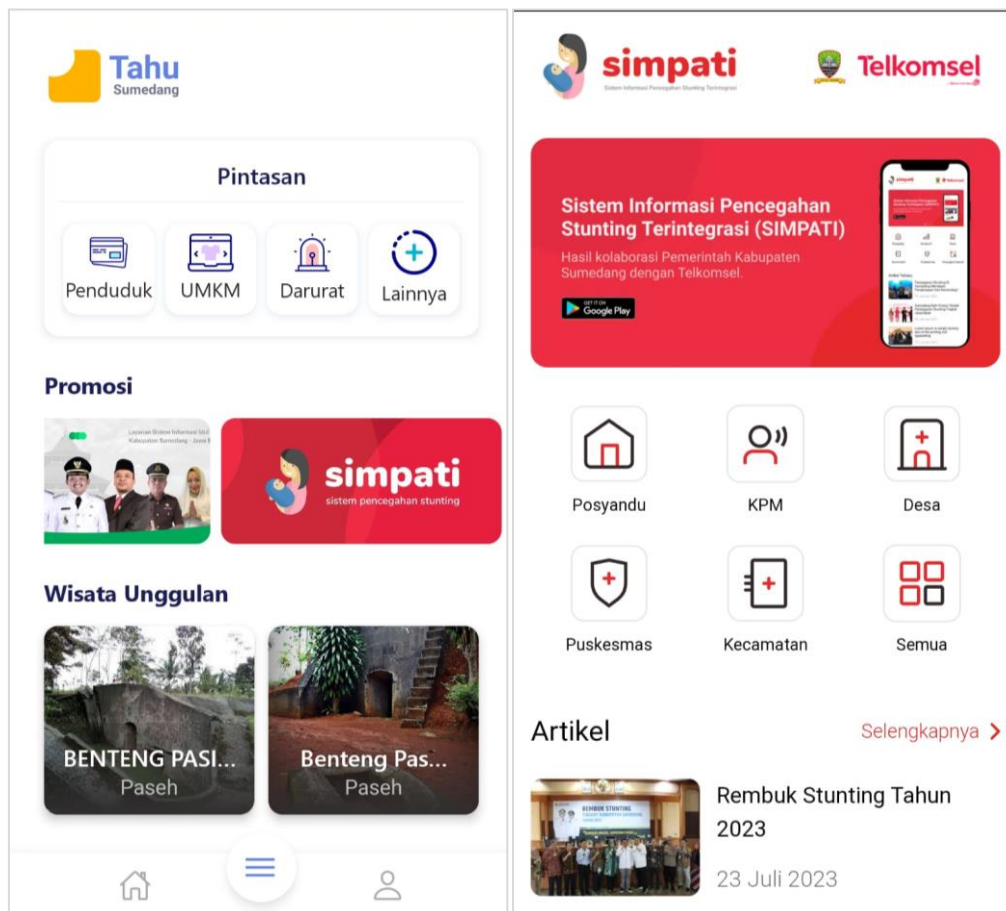
Sumber: Aplikasi MPP, 2023.

Situs MPP menampilkan informasi berupa profil MPP, jenis layanan dan instansi yang tergabung di MPP, berita terkait, dan laporan (Cahyana, 2020). MPP didukung dengan aplikasi MPP yang sudah tersedia di Play Store untuk gawai berbasis android. Aplikasi ini memiliki fitur berupa informasi berbagai layanan yang ada pada MPP serta fitur antrian *online*. Sistem antrian seperti itu mempermudah masyarakat karena tidak perlu datang ke tempat layanan lebih awal melainkan menyesuaikan dengan waktu pelayanan yang diatur sistem.

Aplikasi Sistem Pencegahan Stunting Terintegrasi (Simpati) telah mengantarkan kesuksesan Kabupaten Sumedang dalam penurunan tingkat

stunting sebesar 24% dalam kurun waktu 2018-2022. Aplikasi ini merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan Telkomsel. Simpati menjadi alat interaksi antara antara pimpinan kabupaten (eksekutif), SKPD, Kecamatan, Puskesmas, Desa, KPM, Posyandu, serta masyarakat dalam pencegahan stunting secara terintegrasi.

Gambar 13. Tampilan Aplikasi Simpati dan Tahu Sumedang



Sumber: Aplikasi Simpati; Aplikasi Tahu Sumedang, 2023.

Aplikasi paling mutakhir yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Sumedang adalah Tahu Sumedang. Dalam aplikasi ini tidak hanya berupa penyediaan informasi melainkan sudah bersifat transaksi. Masyarakat dapat mengajukan pelayanan tertentu yang sudah tersedia melalui aplikasi ini. Menu layanan yang sudah tersedia saat ini meliputi kependudukan, UMKM, darurat, MPP, kesehatan, destinasi, pengaduan, tahudiri, pajak, Titikita, berita, dan

tenaga kerja. Layanan kependudukan misalnya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KTP baru, perubahan elemen data, penggantian KTP hilang atau rusak, serta jenis dokumen kependudukan lainnya.

Sesuai pembahasan di atas, menurut hasil analisis penulis bahwa pembangunan *e-government* oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang telah melewati fase interaktif menuju fase transaksional. Berdasarkan Model United Nations (UNDESA, 2001) fase *interactive* dimulai ketika terjadinya interaksi pengguna kepada pemerintah seperti mengunduh formulir, mengirim email, dan berinteraksi melalui web. Sedangkan fase *transactional* adalah ketika pengguna benar-benar bisa mendapatkan layanan dan transaksi lainnya secara daring. Dalam kasus Kabupaten Sumedang, *website* resmi masih cenderung mencerminkan pemberian informasi dan interaktif. Fase interaktif juga tercermin dalam keterhubungan secara digital antara unit kerja Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Pemerintah Desa melalui aplikasi *e-office*, ataupun dengan masyarakat secara terbatas seperti pada Si Ice Mandiri dan Simpati. Adapun pengembangan aplikasi Tahu Sumedang telah menjadi suatu terobosan yang menjadikan *e-government* Kabupaten Sumedang mulai memasuki fase transaksional yang mana masyarakat dapat meminta dan menerima layanan publik secara langsung melalui aplikasi tersebut meskipun masih terbatas pada layanan publik tertentu.

5. Kesimpulan

Tulisan ini telah menyajikan secara deskriptif mengenai perkembangan pembangunan SPBE (*e-government*) oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang. Dalam pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pembangunan *e-government* Kabupaten Sumedang telah melewati fase interaktif menuju fase transaksional. Hal itu ditandai dengan keberadaan aplikasi Tahu Sumedang yang menyediakan fitur transaksi pelayanan publik kepada masyarakat, sedangkan sebagian aplikasi lainnya masih bersifat informatif dan interaktif.

Capaian tersebut merupakan suatu bentuk akselerasi *e-government* dari Pemerintah Kabupaten Sumedang yang ditentukan beberapa faktor. Penulis mengidentifikasi bahwa faktor komitmen politik dari pimpinan daerah sangat dominan dalam pengembangan *e-government* di Kabupaten Sumedang. Visi dan misi kepala daerah telah menjadi landasan bagi kebijakan pembangunan daerah, strategi pengembangan *e-government*, serta diimplementasikan dalam sejumlah program dan kegiatan. Selain itu, pengembangan SDM aparatur dan kolaborasi *multistakeholders* termasuk provider telekomunikasi menjadi kunci keberhasilan implementasi *e-government* di Kabupaten Sumedang.

Daftar Pustaka

- Almuftah, H., Weerakkody, V., & Sivarajah, U. (2016). Comparing and Contrasting e-Government Maturity Models : A Qualitative-Meta Synthesis. *Electronic Government and Electronic Participation*, 0, 69–79. <https://doi.org/10.3233/978-1-61499-670-5-69>
- Astawa, I. P. M., & Dewi, K. C. (2018). E-government Facilities Analysis for Public Services in Higher Education. *Journal of Physics: Conference Series*, 953(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/953/1/012061>
- Atmojo, B. T., & Nurwulan, N. R. (2020). E-Government Global Trends and Future Perspective in Indonesia. *Natapraja*, 8(2), 167–180. <https://doi.org/10.21831/jnp.v8i2.34855>
- Cahyana, A. (2020). *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-government): Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sumedang*. Researchgate. https://www.researchgate.net/publication/353851642_Sistem_Pemerintahan_Berbasis_Elektronik_E-government_Studi_Kasus_pada_Pemerintah_Kabupaten_Sumedang
- DetikCom. (2023, February 8). SPBE di Sumedang Dilirik 4 Kabupaten. *DetikCom*, 2–5. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6558927/spbe-di-sumedang-dilirik-4-kabupaten-sekaligus>
- Farida, I., Setiawan, R., Maryatmi, A. S., & Juwita, N. M. (2020). The Implementation of E-Government in the Industrial Revolution Era 4.0 in Indonesia. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, 22(2), 340–346. <http://ijpsat.ijsh-journals.org>
- Heeks, R. (2003). *Most eGovernment-for- Development Projects Fail: How Can Risks be Reduced?* (No. 14; IGovernment Working Paper Series).

- Heo, I. (2018). The Paradox of Administrative Decentralization Reform in Young Asian Democracies: South Korea and Indonesia. *World Affairs*, 181(4), 372-402. <https://doi.org/10.1177/0043820018813474>
- Karunia, R. L., Budiaji, R., Suzana, R., Dewi, K. S., & Prasetyo, J. H. (2023). Analysis of the Factors that Affect the Implementation of E-Government in Indonesia. *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10(3), 46-54. <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i3.1216>
- KemenPANRB. (2018). *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*. <https://kita.menpan.go.id/wp-content/uploads/2019/11/Paparan-SPBE-Sistem-Pemerintahan-Berbasis-Elektronik.pdf>
- Kingdon, J. W. (2014). *Agendas, Alternatives, and Public Policies* (2nd ed.). Pearson.
- Kumorotomo, W. (2010). *Kegagalan Penerapan E-Government dan Kegiatan Tidak Produktif dengan Internet*. <https://kumoro.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2009/01/kegagalan-penerapan-egov.pdf>
- Machdi, E. I. (2018). *Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. November, 22-23.
- Menteri PAN-RB. (2023). *Keputusan Menteri PANRB Nomor 108 Tahun 2003 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah* (pp. 1-23). Kementerian PANRB.
- Menteri PANRB. (2020). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications Inc.
- Misuraca, G. C. (2007). *E-Governance in Africa From Theory to Action* (1st ed.). International Development Research Centre. <https://doi.org/10.1001/jama.287.2.248-jbk0109-4-1>
- MPR-RI. (2022). *MPR-RI Apresiasi Sumedang Sebagai Model Kabupaten Digital Di Indonesia*. <https://www.mpr.go.id/berita/MPR-RI-Apresiasi-Sumedang-Sebagai-Model-Kabupaten-Digital-Di-Indonesia>
- Obi, T. (2007). *E-Governance: A Global Perspective on a New Paradigm* (T. Obi (ed.)). IOS Press.
- Pemkab Sumedang. (2019a). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020*. Pemerintah Kabupaten Sumedang.
- Pemkab Sumedang. (2019b). *RPJMD Kab Sumedang Tahun 2018-2023*.
- Pemkab Sumedang. (2020). *Spot Wifi Gratis Bisa Jadi Tempat Diskusi*.

- <https://sumedangkab.go.id/berita/detail/spot-wifi-gratis-bisa-jadi-tempat-diskusi>
- Pemkab Sumedang. (2021a). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2020*.
https://sumedangkab.go.id/data/download/LKIP_KABUPATEN_SUMEDANG_TAHUN_2020_FINAL.pdf
- Pemkab Sumedang. (2021b). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022*. Pemerintah Kabupaten Sumedang.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/210747/perbup-kab-sumedang-no-71-tahun-2021>
- Pemkab Sumedang. (2023). *Sudah 100 Kabupaten / Kota ke Sumedang untu Studi Tiru SPBE*. <https://sumedangkab.go.id/berita/detail/sudah-100-kabupaten-kota-ke-sumedang-untu-studi-tiru-spbe>
- Pemkab Sumedang, & UPM. (2020). *Masterplan Transformasi Digital Menuju Sumedang Happy Digital Region*.
- PLN Icon Plus. (2023). *PLN Icon Plus Antarkan Kabupaten Sumedang Raih Predikat Terbaik dalam Penyelenggaraan SPBE*. Webiste PLN Icon Plus.
<https://plniconplus.co.id/pln-icon-plus-antarkan-kabupaten-sumedang-raih-predikat-terbaik-dalam-penyelenggaraan-spbe/>
- Sekretariat Kabinet. (2023). *Intensifkan Pemanfaatan SPBE , Sumedang Berhasil Turunkan Stunting*. <https://setkab.go.id/intensifkan-pemanfataan-spbe-sumedang-berhasil-turunkan-stunting-hingga-827/#:~:text=Sekretariat Kabinet Republik Indonesia %7C Intensifkan,Stunting Hingga 8%2C27 Persen>
- Silalahi, U., & Syafri, W. (2015). *Desentralisasi Dan Demokrasi Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Pemerintah Daerah Lebih Transparan, Partisipatif, Responsif dan Akuntabel*. IPDN Press.
- UNDESA. (2001). Benchmarking E-government: A Global Perspective Assessing the Progress of the UN Member States. In *United Nations Division for Public Economics and Public Administration and American Society for Public Administration*.
<https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/English.pdf>
- UNDESA. (2003). *UN Global E-government Survey 2003*.
- UNDESA. (2004). *United Nations Global E-Government Readiness Report 2004: Toward Access For opportunity*.
- UNDESA. (2005). *UN Global E-Government Readiness Report 2005: From E-government to E-inclusion*.

- UNDESA. (2008). *UN E-Government Survey 2008: From E-Governmen to Connected Governance*.
- UNDESA. (2010). *E-Government Survey 2010: Leveraging e-Government at a Time of Financial and Economic Crisis*.
<http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan038851.pdf>
- UNDESA. (2012). *United Nations E-Government Survey 2012: E-Government for the People*. United Nations Department of Economic and Social Affairs Th.
- UNDESA. (2014). *United Nations E-Government Survey 2014: E-Government for the Future We Want*. United Nations Department of Economic and Social Affairs Th. <https://doi.org/978-92-1-123198-4>
- UNDESA. (2016). *E-government Survey 2016: E-Government in Support of Sustainable Development*. United Nations Department of Economic and Social Affairs Th.
<http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN-DPADM/UNPAN038853.pdf>
- UNDESA. (2018). *United Nations e-Government Survey 2008: Gearing E-Government to support transformation towards sustainable and resilient societies*.
- UNDESA. (2020). *E-Government Survey 2020 - Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development*.
- UNDESA. (2022). *E-Government Survey 2022: The Future of Digital Government*. United Nations Departemet for Social and Economic Affairs.
<https://publicadministration.un.org/en/>
- World Bank. (2002). *The World Bank New-Economy Sector Study Electronic Government and Governance: Lessons for Argentina*. July.
<http://documents.worldbank.org/curated/en/527061468769894044/pdf/266390WP0E1Gov1gentina1Final1Report.pdf>
- Yuniawati, F., Bakti, I., & Nugraha, A. R. (2023). City branding Kabupaten Sumedang melalui program Sumedang Happy Digital Region. *Comdent: Communication Student Journal*, 1(1), 30-45.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.

Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020.